

LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN
DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PALEMBANG ILIR TIMUR

JALAN KAPTEN A.RIVAI NO.4 GKN BLOK D PALEMBANG 30129
TELEPON (0711) 313870 FAXIMILE (0711) 354389
SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi.....	1
Pengantar.....	2
Bab I Pendahuluan.....	3
Bab II Perencanaan Kinerja.....	9
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	13
Bab IV Penutup.....	

PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) tingkat KPP Pratama Palembang Ilir Timur merupakan perwujudan atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), Surat Menteri Keuangan Nomor S-571/MK.1/2015 tanggal 18 Desember 2015 hal Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2016.

Laporan Kinerja mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak menuju terwujudnya *Good Governance*, dan merupakan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja.

Laporan Kinerja Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Kontrak Kinerja masing-masing unit, Rencana Strategis DJP 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 dan RKA-KL Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan pengguna anggaran serta Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Palembang, 31 Januari 2025

Plh. Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Martini



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) tingkat KPP Pratama Palembang Ilir Timur merupakan perwujudan atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), Surat Menteri Keuangan Nomor S-571/MK.1/2015 tanggal 18 Desember 2015 hal Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2016.

Laporan Kinerja Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Kontrak Kinerja masing-masing unit, Rencana Strategis DJP 2020-2024, Rencana Stategis Kementerian Keuangan 2020-2024 dan RKA-KL Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan pengguna anggaran serta Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021 Tanggal 15 April 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

1.1 Tugas Organisasi

KPP Pratama Palembang Ilir Timur mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.2 Fungsi Organisasi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Palembang Ilir Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengumpulan, pencairan , dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, serta penyajian informasi perpajakan ;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan ;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya ;
4. Penyuluhan perpajakan ;
5. Pelaksanaan Registrasi Wajib Pajak ;
6. Pelaksanaan Ekstensifikasi ;
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak ;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak ;
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak ;
10. Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan ;
11. Pelaksanaan administrasi KPP Pratama.

1.3 Struktur Organisasi

Sesuai Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020, Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur adalah :

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi yang diperankan KPP Pratama Palembang Ilir Timur pada hakekatnya merupakan amanat Direktorat Jenderal Pajak, oleh karena itu KPP Pratama Palembang Ilir Timur berusaha untuk menjadi aparat yang akuntabel, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna, bersih dari berbagai bentuk

penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan visi dan misi yang dibebankan secara transparan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

1.4 Peran Strategis KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-288/PJ/2018 tentang Referensi Wilayah Dan Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebanyak 259.640 (sumber: Masterfile Wajib Pajak) Wajib Pajak (s.d. 31 Desember 2023) dan wilayah kerja sebanyak 7 Kecamatan dan 42 Kelurahan yaitu;

a. Kecamatan Ilir Timur I terdiri dari:

Kelurahan 13 Ilir, Kelurahan 14 Ilir, Kelurahan 15 Ilir, Kelurahan 16 Ilir, Kelurahan 17 Ilir, Kelurahan 18 Ilir, Kelurahan 20 Ilir I, Kelurahan 20 Ilir III, Kelurahan 20 Ilir IV, Kelurahan Kepandean Baru, dan Kelurahan Sungai Pangeran.

b. Kecamatan Ilir Timur II terdiri dari:

Kelurahan 1 Ilir, Kelurahan 2 Ilir, Kelurahan 3 Ilir, Kelurahan 5 Ilir, Kelurahan Lawang Kidul, dan Kelurahan Sei Buah.

c. Kecamatan Ilir Timur III terdiri dari:

Kelurahan 8 Ilir, Kelurahan 9 Ilir, Kelurahan 10 Ilir, Kelurahan 11 Ilir, Kelurahan Duku, dan Kelurahan Kuto Batu.

d. Kecamatan Kalidoni terdiri dari:

Kelurahan Bukit Sangkal, Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sei Lais, Kelurahan Sei Selayur, dan Kelurahan Sei Selincih.

e. Kecamatan Kemuning terdiri dari:

Kelurahan 20 Ilir II, Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Pipa Reja, Kelurahan Sekip Jaya, dan Kelurahan Talang Aman.

f. Kecamatan Sako terdiri dari:

Kelurahan Sako, Kelurahan Sakobaru, Kelurahan Sialang, dan Kelurahan Suka Maju.

g. Kecamatan Sematang Borang terdiri dari:

Kelurahan Karya Mulia, Kelurahan Lebung Gajah, Kelurahan Sri Mulya, dan Kelurahan Sukamulya.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk menciptakan Institusi yang good governance, terhadap para pegawai diterapkan kode etik yang secara jelas menyebutkan hal-hal yang wajib dilakukan dan yang dilarang untuk dilakukan oleh para pegawai, berikut sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut. Pelanggaran terhadap kode etik ini diawasi oleh komite kode etik yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Aspek Kepegawaian yang mendukung operasional KPP Pratama Palembang Ilir Timur dapat digambarkan sebagai berikut :

Distribusi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1 distribusi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Nama Unit Eselon IV	Tingkat Pendidikan				
		SMA	D I	D III	DIV/S1	S2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	KPP Pratama					1
2	Fungsional Pemeriksa Pajak			1	4	8
3	Seksi Pelayanan		6	2	5	2
4	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		3	1	1	3
5	Seksi Pengawasan I		1		4	2
6	Seksi Pengawasan II		1	1	3	3
7	Seksi Pengawasan III			1	6	
8	Seksi Pengawasan IV		1	2	5	
9	Seksi Pengawasan V				3	4
10	Seksi Pengawasan VI		4	1		3
11	Seksi Penjaminan Kualitas Data	1	2	1	1	1
12	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal		3	3	4	
Jumlah		1	21	13	36	27

Distribusi Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan

Tabel 2.2 distribusi Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan

No	Golongan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	IV	10
2	III	53
3	II	35
4	I	0
Jumlah Pegawai		98

Distribusi Pegawai berdasarkan jabatan

Tabel 2.3 distribusi Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Kepala Kantor	1
2	Kasi/Kasubbag	10
3	Account Representative	36
4	Pelaksana	33
5	Fungsional Pemeriksa	13
6	Penilai	1
7	Fungsional Penyuluh	4
Jumlah Pegawai		98

Distribusi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.4 distribusi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Unit Eselon IV	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KPP Pratama	1	
2	Fungsional Pemeriksa Pajak	10	3
3	Seksi Pelayanan	5	10
4	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	5	3
5	Seksi Pengawasan I	5	2
6	Seksi Pengawasan II	5	3
7	Seksi Pengawasan III	5	2
8	Seksi Pengawasan IV	4	4
9	Seksi Pengawasan V	4	3
10	Seksi Pengawasan VI	5	3
11	Seksi Penjaminan Kualitas Data	2	4
12	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	4	6
Jumlah		55	43

3. Sistematika Laporan

Adapun Sistematika Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Palembang Ilir Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Daftar Isi
2. Kata Pengantar
3. Bab I : Pendahuluan
4. Bab II : Perencanaan Kinerja
5. Bab III : Akuntabilitas Kinerja
6. Bab IV : Penutup
7. Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi, Misi, dan Nilai DJP

a. Visi KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Sesuai dengan KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, maka Visi KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebagai instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak “Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

b. Misi KPP Pratama Palembang Ilir Timur

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil, dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

c. Nilai Kementerian Keuangan

INTEGRITAS

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

PROFESIONALISME

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

SINERGI

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

PELAYANAN	Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
KESEMPURNAAN	Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

2. Tujuan, Sasaran, dan Strategi DJP

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, satu sampai lima tahun ke depan. Oleh karena itu sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebagai Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak memiliki tujuan yaitu menunjang kemandirian pembiayaan. KPP Pratama Palembang Ilir Timur memiliki tujuan jangka pendek sebagai berikut:

- Mengamankan penerimaan Negara dari sektor perpajakan yang telah ditetapkan pada APBN;
- Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia KPP Pratama Palembang Ilir Timur;
- Meningkatkan citra pegawai pajak di mata masyarakat.

Sedangkan tujuan jangka panjang adalah:

- Mewujudkan sistem self assessment yang mantap;
- Menopang tercapainya tax ratio, tax coverage ratio dan compliance ratio yang cukup tinggi;
- Mewujudkan terbentuknya pelayanan prima bagi Wajib Pajak dengan orientasi kepuasan Wajib Pajak.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, KPP Pratama Palembang Ilir Timur di tahun 2024 memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu tercapainya target penerimaan Pajak yang diamanahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia serta pengelolaan sarana prasarana yang baik untuk meningkatkan produktivitas kerja.

c. Kebijakan

Demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan kebijakan-kebijaksanaan yang dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan intern;
- b. Pencapaian standar prestasi pegawai;
- c. Penerapan pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan 'good governance'.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan maka rencana kinerja KPP Pratama Palembang Ilir Timur sesuai dengan Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2024 , yaitu sebagai berikut:

No	Rincian IKU	TARGET			
		KUANTITAS /OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1.	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100	12 bulan	-
2.	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	12 bulan	-
3.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100	12 bulan	-
4.	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100	12 bulan	-
5.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100	12 bulan	-
6.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	100	12 bulan	-
7.	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	100	12 bulan	-
8.	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	100	12 bulan	-
9.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100	12 bulan	-
10.	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100	12 bulan	-
11.	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	100%	100	12 bulan	-

12.	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100	12 bulan	-
13.	Tingkat efektivitas penagihan	75%	100	12 bulan	-
14.	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100	12 bulan	-
15.	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	100	12 bulan	-
16.	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP *)	55%	100	12 bulan	-
17.	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100	100	12 bulan	-
18.	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	100	12 bulan	-
19.	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	100	12 bulan	-
20.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	12 bulan	-

BAB III

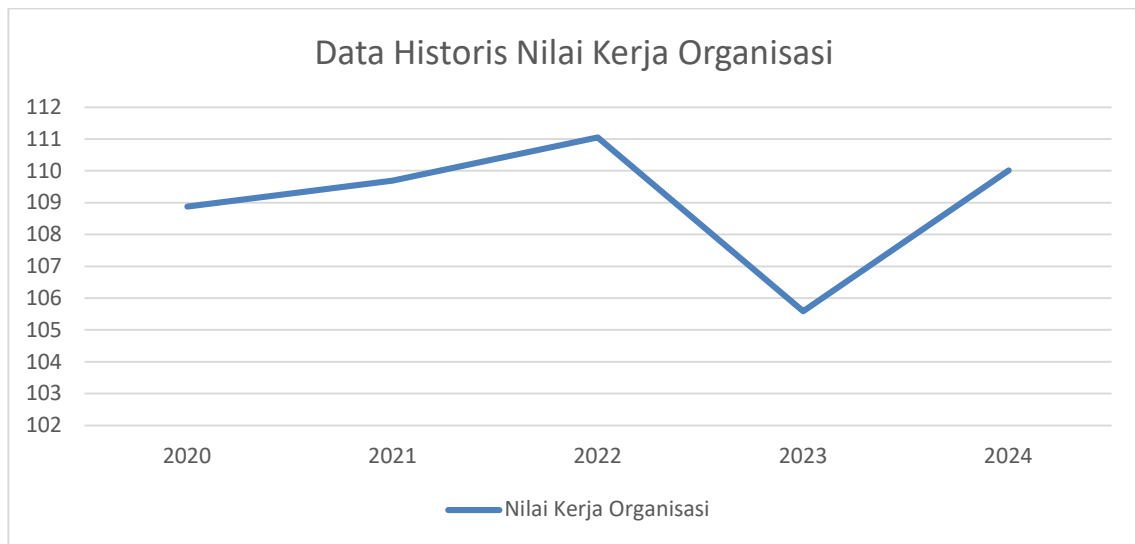
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KPP KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	103,12
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							103,12
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,28%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,28
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	107,00	Max	P/L	19,00%	42,22%	107,00
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	103,17
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,53
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,03%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,03
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	103,58%	Max	P/L	19,00%	42,22%	103,58
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							104,80
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	104,80%	Max	E/M	21,00%	100,00%	104,80
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,76
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,98
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,96%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,96
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,34%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,55
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,70%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,70
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,96%	Max	P/M	14,00%	33,33%	118,96
7	Penegakan hukum yang efektif							112,40
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	118,90%	Max	P/M	14,00%	26,92%	118,90
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	112,27%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							117,88
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	115,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	115,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	83,20%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	117,01
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114,02
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,25	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,25
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,68	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,74
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								110,01

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Palembang Ilir Timur telah mencapai realisasi melebihi target yang ditentukan dengan Nilai Kinerja Organisasi 110,01. Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 yaitu sebesar 110,01.

Keberhasilan KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam mencapai Nilai Kinerja Organisasi melebihi target yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan semua pihak yang mendukung. Dengan jumlah pegawai per Desember 2024 sebanyak 98 orang, KPP Pratama Palembang Ilir Timur telah berupaya untuk mendayagunakan kemampuan Sumber Daya yang ada secara efektif dan efisien.

Berikut analisis tiap Capaian Kinerja Organisasi pada Tahun 2024:

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

a. Persentase realisasi penerimaan pajak

Persentase realisasi penerimaan pajak	DJP	%	KPP Pratama Prabumulih	%
Target	Rp 1,921,943,100,000,000	100,00	Rp2,312,894,150,000	100,00
Realisasi	Rp 1,930,811,632,251,832	100.46	Rp2,319,339,285,402	100,28

Kinerja diukur sesuai dengan menghitung perbandingan realisasi dengan target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak Tahun 2024 sejumlah Rp2,312,894,150,000, melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp2,319,339,285,402 atau mencapai realisasi sebesar 100.28% tidak jauh dengan persentase capaian penerimaan pajak secara nasional yang mencapai angka 100,46%.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Pratama Palembang Ilir Timur dalam mencapai target kinerja realisasi penerimaan pajak sebagai berikut :

1. Menyusun rencana penerimaan pajak bruto;
2. Menyusun distribusi target PPM dan PKM;
3. Menyusun prakiraan restitusi hasil pemeriksaan;
4. Menyusun prakiraan pengembalian pendahuluan;
5. Melakukan analisis penerimaan bruto dengan memperhitungkan penambahan Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak Pindah, Wajib Pajak masuk, Sektoral PDRB, Pagu DIPA, Regulasi sehingga penerimaan mencerminkan potensi pajak yang sebenarnya, serta mendistribusikan target kepada *Account Representative*;
6. Menerbitkan STP, baik yang tersedia di daftar nominatif *approweb* maupun yang mandiri;
7. Menambah jumlah Wajib Pajak hasil ekstensifikasi;
8. Menindaklanjuti data tahun berjalan maupun sebelum tahun berjalan;
9. Meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan PKM Pengawasan;
10. Mempercepat tindak lanjut penyelesaian pemeriksaan dan kegiatan penagihan;
11. Melakukan manajemen restitusi.

b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Palembang Ilir Timur di tahun 2024 sebesar 107,00%.

Terdapat beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam mencapai target, seperti:

- a. Menyusun rencana penerimaan pajak bruto;
- b. Menyusun prakiraan restitusi hasil pemeriksaan;
- c. Menyusun prakiraan pengembalian pendahuluan;
- d. Mengoptimalkan penggalan potensi dengan cara menindaklanjuti data wajib pajak yang pembayaran pajaknya mengalami penurunan signifikan;
- e. Memberikan edukasi persuasif kepada Wajib Pajak PKP Badan Usaha, Perkebunan Sawit dan Pertambangan Batu Bara;
- f. Menguji kepatuhan wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian;
- g. Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan.

2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Penerimaan pajak dari kegiatan PPM tahun 2024 mencapai Rp 2.195.067.321.406 atau 100.03% dari target yang diberikan sebesar Rp 2.194.385.811.000.

Penerimaan dari kegiatan pengawasan pembayaran masa bersumber paling besar dari Wajib Pajak cabang dan Wajib Pajak bendahara, yaitu sebesar 60% dari total penerimaan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam upaya mencapai target kinerja penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM), antara lain :

1. Menerbitkan STP tahun berjalan sesuai Daftar Nominatif;
2. Menindaklanjuti Data Matching (Data Pemicu tahun berjalan);
3. Melakukan dinamisasi PPh pasal 25 dan meneliti permohonan pengurangan PPh pasal 25;
4. Melakukan kolaborasi antara lain dengan KPP Madya Palembang untuk menyediakan Wajib Pajak dalam DSE;
5. Menyusun DSE dan melakukan pembahasan dengan Komite Kepatuhan;
6. Menindaklanjuti DSPE dengan SP2DKE;
7. Membuat daftar sasaran Wajib Pajak untuk dijadikan prioritas pengawasan pembayaran masa.

b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Jumlah SPT Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama 2024 adalah sebanyak 61.237 SPT dari target sebesar 68.699 sehingga persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tercapai sebesar 103.58% dari target sebesar 100%. Kegiatan KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam mencapai target kepatuhan SPT sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi bersama Camat dan Lurah terkait SPT Tahunan, serta memasang Banner / Spanduk SPT Tahunan di Kantor Kecamatan dan Kelurahan, sosialisasi pelaporan SPT Tahunan kepada ASN, Himbauan berupa video terkait pelaporan SPT Tahunan oleh camat, pengiriman pesan himbauan SPT Tahunan dari camat via Whatsapp kepada penduduk melalui jaringan Lurah- RW – RT;
2. Melakukan sosialisasi pembuatan bukti potong kepada ILAP Pemberi kerja;
3. Melakukan penerimaan SPT Tahunan PPh di dalam maupun luar kantor.

3. Kepatuhan Tahunan Sebelumnya yang Tinggi

a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Capaian penerimaan pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur dari kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM) sebesar Rp 124.191.438.256 dari target yang ditentukan sebesar Rp 118.508.339.000 atau sebesar 104.80%.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam upaya mencapai target kinerja penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM), antara lain :

1. Menganalisis Data Pemicu dan Data Penguji Prioritas yang belum masuk dalam DPP dan SP2DK *Outstanding*;
2. Menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis dari DIP dan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka dan Belitung;
3. Melakukan analisis Mandiri berdasarkan data internal (Data *Benchmarking* sektor dagang, Wajib Pajak NE ada data), eksternal (Data PPAT) dan hasil kunjungan *Account Representative* sebagai bahan DPP *mandatory* dan WRA;
4. Menyusun Daftar Prioritas Pengawasan dan melakukan pembahasan bersama komite kepatuhan;
5. Menindaklanjuti LHP2DK dalam pengawasan yang belum selesai sepenuhnya;
6. Penggalan potensi Wajib Pajak perdagangan yang mempunyai omzet tinggi dan SPT RTLB;
7. Melakukan tindakan penagihan aktif berupa penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan Aset, dan permintaan pencegahan berupa aset *tracing*;
8. Melakukan upaya percepatan pembayaran SKP melalui pendekatan secara persuasif kepada Wajib Pajak.

4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Selama tahun 2024 KPP Pratama Palembang Ilir Timur telah melakukan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak berupa kelas pajak *online*, *Tax Goes To School*, maupun kegiatan penyuluhan lainnya. Hal ini menjadikan KPP Pratama Palembang Ilir Timur memiliki capaian efektivitas kegiatan

edukasi dan penyuluhan melebihi target yang telah ditentukan, yaitu sebesar 88,80%, dimana target yang telah ditentukan yaitu 74%.

b. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Pada Tahun 2024, KPP Pratama Palembang Ilir Timur berhasil mencapai indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan sebesar 107.86 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target adalah :

1. Mengumpulkan data calon responden;
2. Melakukan monitoring dan himbauan terhadap wajib pajak untuk mengisi survei efektivitas penyuluhan dan pelayanan;
3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memperhatikan jangka waktu penyelesaian layanan tepat waktu.

5. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Realisasi kinerja pengawasan pembayaran masa Tahun 2024 adalah 116% dari total target 90%.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam upaya mencapai target kinerja pengawasan pembayaran masa antara lain :

1. Mengawasi penerimaan rutin secara intensif atas wajib pajak Penentu Penerimaan sektoral terbesar, dan melakukan visit dan/atau mengirimkan himbauan jika belum ada pembayaran;
2. Melakukan Pengawasan Pembayaran wajib pajak Cabang, KSO, dan bendahara serta melakukan visit dan/atau mengirimkan himbauan jika belum ada pembayaran;
3. Menerbitkan STP atas pajak yang tidak atau kurang dibayar;
4. Melakukan tindaklanjut terhadap DSE yang ada pada aplikasi SIDJP Nine.

6. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Realisasi permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Tahun 2024 sebesar 120% namun DPP yang tersedia baik dari hasil rekomendasi *mandatory* maupun analisa mandiri masih belum ditindaklanjuti secara optimal.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam upaya mencapai target kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, antara lain :

1. Menyampaikan SP2DK secara langsung ke Wajib Pajak oleh *Account Representative*;
2. Memanggil Wajib Pajak yang tidak ada jawaban atas SP2DK yang sudah disampaikan;
3. Mengumpulkan data dan informasi yang valid dari pengolahan mandiri maupun *feeding* data yang berasal dari data internal dan eksternal serta melakukan klasifikasi berdasarkan skala prioritas;
4. Melakukan penelitian atas data dan informasi yang valid sesuai dengan prioritas cluster data;
5. Menyusun Daftar Prioritas Pengawasan yang bersumber dari Peta Resiko CRM, Data Pemicu, Data Penguji Approweb;
6. Mempercepat penerbitan SP2DK setelah penetapan DPP;
7. Mempercepat penyelesaian SP2DK yang belum LHP2DK dengan prioritas atas SP2DK *Outstanding* dengan cara tatap muka, *visit*, dan *online*;
8. Melakukan penelitian dan analisa potensi pajak dalam rangka menyiapkan DPP *Mandatory* Semester II Tahun 2024;

b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan tercapai sebesar 119.70% dengan rincian Realisasi DSTP dan Pemanfaatan Data Matching sebesar 120%. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam upaya mencapai target kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, antara lain :

1. Menerbitkan STP Tahun lampau sesuai Daftar Nominatif;
2. Menindaklanjuti Data Matching (Data pemicu tahun lampau).

c. Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 118.86% dari target sebesar 100%. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam upaya mencapai target kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembahasan dan penyampaian Laporan Komite Kepatuhan tepat waktu;
2. Mengadakan rapat pembahasan untuk penetapan DSPP baik RBP maupun kolaboratif;

3. Melakukan koordinasi antara Fungsional Pemeriksa Pajak, *Account Representative* dan Fungsional Penilai untuk melakukan penggalan potensi dalam rangka pemenuhan bahan baku pemeriksaan.

7. Penegakan Hukum yang Efektif

a. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Realisasi efektivitas pemeriksaan KPP Pratama Palembang Ilir Timur tercapai sebesar 118.90% dari target sebesar 100%, dengan rincian:

1. Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP sebesar 113.45%
2. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan sebesar 102.85%;
3. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan sebesar 103.59%;
4. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu sebesar 120%;
5. Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi sebesar 120%;
6. Persentase Tingkat Efektivitas Penilaian sebesar 117.25%.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam upaya mencapai target kinerja efektivitas pemeriksaan, antara lain :

1. Melakukan penelitian AHU pada sistem Appportal untuk penggalan potensi peralihan saham;
2. Melakukan penelitian atas data PHTB peralihan Tanah dan/atau bangunan;
3. Berkoordinasi dengan Fungsional Pemeriksa, *Account Representative* atas objek pajak yang dapat dilakukan penilaian dan/atau pemeriksaan;
4. Berkoordinasi dengan Tim Kanwil Sumatera Selatan dan Kep Bangka dan Belitung melalui surat permohonan bantuan penilaian untuk kegiatan penilaian bisnis;
5. Melakukan percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan;
6. Melakukan akselerasi penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan untuk NP2 yang telah terbit.

b. Tingkat Efektivitas Penagihan

Realisasi efektivitas penagihan tercapai sebesar 112.27% dari target 75% dengan rincian sebagai berikut,

1. Realisasi variable Tindakan penagihan sebesar 60%;
2. Realisasi Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC sebesar 24%;
3. Pencairan Wajib Pajak DSPC sebesar 28.27%.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam upaya mencapai target kinerja efektivitas penagihan, antara lain :

1. Melakukan optimalisasi *Profiling* Penanggung Pajak;
2. Melakukan tindakan penagihan aktif (penerbitan surat teguran, surat paksa, SPMP, pemblokiran, pencegahan) dan pencairan atas Wajib Pajak dalam Daftar Susunan Prioritas Pencairan (DSPC) maupun Non DSPC tahun 2024;
3. Penyitaan aset penanggung pajak yang memiliki likuiditas tinggi;
4. Pelaksanaan pemblokiran rekening yang efektif melalui pemanfaatan data EOI, IBK, dan SID (Sistem Informasi Debitur);
5. Percepatan pelaksanaan lelang atas aset wajib pajak/ penanggung pajak yang telah dilakukan penyitaan;
6. Mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan pihak/instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan pajak;
7. Pelaksanaan *Soft Collecting* melalui konseling penanggung pajak.

c. **Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tercapai sebesar 100% dengan rincian terdapat 1 usulan pemeriksaan yang disetujui.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam upaya mencapai target Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan, antara lain :

1. Koordinasi antara Seksi Pengawasan dengan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep Bangka Belitung dalam rangka kolaborasi Penegakan Hukum;
2. Melakukan sinergi internal antara AR, FPP dan Penilai dalam rangka percepatan penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

8. **Data dan Informasi yang Berkualitas**

a. **Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan**

Realisasi persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tercapai sebesar 115% dari target sebesar 100%.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam upaya mencapai target penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan, antara lain :

1. Melakukan pengamatan atas Wajib Pajak oleh *Accout Representative* dan/atau Fungsional Pemeriksa Pajak;
2. *Mapping* Wajib Pajak dan Mengidentifikasi potensi pajak di Wilayah Kerja;
3. Melakukan penelitian kebenaran atas data pendukung subjek dan objek pajak;

4. Melakukan perekaman data KPDL pada aplikasi sesuai tanggal penugasan dan melakukan pengiriman data KPDL secara sistem tepat waktu.

b. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Realisasi persentase penghimpunan data regional dari ILAP tercapai sebesar 83.20% dari target sebesar 55%.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Palembang Ilir Timur adalah :

1. Mengirim permohonan data kepada Pemerintah Daerah;
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tercapai sebesar 117.25% dari target sebesar 100%, hal ini dirasa belum maksimal sehingga diperlukan adanya upaya dari seluruh pihak dalam mendukung kegiatan peningkatan kompetensi serta dalam pelaksanaan kegiatan kebintalan.

b. Indeks Penilaian Integritas Unit

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 96.68% dari target sebesar 85%. Adapun langkah yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam mencapai target Indeks Penilaian Integritas Unit adalah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan pemilik proses bisnis terkait data nomor telepon dan email responden yang valid dan dapat dihubungi;
2. Melaksanakan sosialisasi benturan kepentingan kepada seluruh pegawai;
3. Melaksanakan sosialisasi Anti Korupsi dan penegasan kode etik dan perilaku kepada seluruh pegawai;
4. Penandatanganan dan Pendeklarasian komitmen integritas pimpinan di depan seluruh pegawai;
5. Melaksanakan pemantauan kode etik dan kode perilaku pegawai metode Inspeksi Mendadak.

c. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Resiko

Realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebesar 100% dari target 90%. Target ini dapat dicapai dengan melakukan Monitoring pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko.

10. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada triwulan IV sesuai data SPAN adalah 97,53. Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja sesuai pada aplikasi Monev Kemenkeu adalah 98,77. Apabila dikonversi menjadi indeks, diperoleh angka indeks 118,33. Capaian tersebut telah melampaui target yaitu 100.

Alasan utama capaian indikator tidak sempurna adalah capaian penyerapan anggaran dan belanja kontraktual yang nilainya belum maksimal.

Isu utama yang dihadapi pada triwulan IV adalah upaya pencapaian nilai SMART yang seringkali menyebabkan capaian IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran kurang dari target yang ditentukan.

B. Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan kegiatan KPP Pratama Palembang Ilir Timur diperoleh dari DIPA Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, KPP Pratama Palembang Ilir Timur pada tahun 2024 memperoleh dana sebesar Rp. 6.620.531.000,- dengan realisasi DIPA BA Tahun 2024 sebesar Rp. 6.365.251.048,-.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur terdiri dari 2 jenis yaitu sumber daya pegawai dan sumber daya alat.

Adapun Rincian dari Jumlah Pegawai KPP Pratama Palembang Ilir Timur per tanggal 31 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Jabatan		Jumlah Pegawai
(1)	(2)		(3)
1	Jabatan Administrasi	Eselon III	1
2		Eselon IV	10
3	Jabatan Fungsional	Penilai Pajak	1
4		Pemeriksa Pajak	13
5		Penyuluh Pajak	4
6	Pelaksana	Account Representative	36
7		Pelaksana	33
Jumlah Pegawai			98

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-244/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-212/PJ/2021 tentang Penetapan Standar Formasi Pegawai pada Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan bahwa Formasi Pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur adalah sebagai berikut:

No	Nama Jabatan		Jumlah Pegawai
(1)	(2)		(3)
1	Jabatan Administrasi	Eselon III	1
2		Eselon IV	10
3	Jabatan Fungsional	Penilai Pajak	1
4		Pemeriksa Pajak	13
5		Penyuluh Pajak	4
6	Subagagian Umum dan Kepatuhan Internal	Sekretaris	1
		Bendahara	1
		Pelaksana Kepatuhan Internal	2
		Pelaksana Pendukung	5
7	Seksi Penjaminan Kualitas Data	Pelaksana PKD	5
8	Seksi Pelayanan	Pelaksana Pelayanan	10
9	Seksi Pengawasan	AR Strategis	6
		AR Kewilayahan	30
		Pelaksana Pendukung	3
10	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Juru Sita	2
		Petugas Pemeriksa	2
		Pelaksana Pendukung	2
Jumlah Pegawai			98

Dapat disimpulkan, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut terdapat selisih dari Jumlah Pegawai KPP Pratama Palembang Ilir Timur per 31 Desember 2024 dengan Formasi Pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur yaitu terdapat kekurangan jumlah Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penyuluh Pajak,

Account Representative Strategis, Pelaksana Pendukung Seksi Penjaminan Kualitas Data, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, serta terdapat kelebihan Account Representative Kewilayahan.

No	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai	Jumlah Berdasarkan KEP-244/PJ/2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jabatan Administrasi	Eselon III	1
2		Eselon IV	10
3	Jabatan Fungsional	Penilai Pajak	1
4		Pemeriksa Pajak	13
5		Penyuluh Pajak	4
6	Subagagian Umum dan Kepatuhan Internal	Sekretaris	1
		Bendahara	1
		Pelaksana Kepatuhan Internal	2
		Pelaksana Pendukung	5
7	Seksi Penjaminan Kualitas Data	Pelaksana PKD	5
8	Seksi Pelayanan	Pelaksana Pelayanan	10
9	Seksi Pengawasan	AR Strategis	6
		AR Kewilayahan	30
		Pelaksana Pendukung	3
10	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Juru Sita	2
		Petugas Pemeriksa	2
		Pelaksana Pendukung	2
Jumlah Pegawai		98	107

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya anggaran yang ada telah dialokasikan dengan baik untuk kebutuhan sarana dan prasarana KPP Palembang Ilir Timur seperti jumlah perangkat komputer yang telah memadai bagi seluruh pegawai di KPP Palembang Ilir Timur. Namun setiap Barang Milik Negara (BMN) yang ada di kantor disalurkan atau digunakan sedemikian rupa agar dana yang digunakan dapat mencukupi satu tahun anggaran. Dalam pelaksanaannya sebagian barang yang telah rusak berat dan umur barang sudah masuk habis pakai, lalu diusulkan penghapusan yang selanjutnya akan dilelang dan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tersedianya teknologi informasi perpajakan yang digunakan dalam rangka penerapan sistem administrasi modern di lingkungan KPP Pratama Palembang Ilir Timur yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), aplikasi Aproweb, Apportal, Alket, Aktivasi EFIN, ALPP, Aplikasi Renpen, Billing DJP, Ereg, SIDJPNINE, MPN-Info, Mandor-djp, SIKKA, Persil, Helpmi, Lasis Online, serta peraturan perpajakan yang kondusif yang dapat diakses melalui TKB-DJP dan Portaldjp.

Kemampuan menyediakan sarana dan prasarana merupakan hal mutlak yang harus disediakan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana yang telah ada cukup memadai dengan tersedianya berbagai fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

D. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kerja

Evaluasi dan Analisis Kinerja Pencapaian Terhadap Sasaran Utama Penerimaan Pajak telah menjadi bagian dari anggaran penerimaan dan belanja Negara yang cukup signifikan. Sudah selayaknya kegiatan yang diambil harus mengacu pada pencapaian sasaran utama yaitu terealisasinya target penerimaan pajak.

Pada tahun 2024 KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berperan serta dalam mengamankan rencana penerimaan pajak bagi Negara dengan target penerimaan sebesar Rp. 2.312.894.150.000,- yang terealisasi Rp. 2.319.339.285.402,- atau sebesar 100,28% dari total target yang telah diberikan (sumber data : Apportal Penerimaan DJP). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebesar 110.01% dengan 20 IKU KPP Pratama Palembang Ilir Timur berstatus hijau.

Jika melihat data historis Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur mengalami peningkatan, namun hal ini akan tetap di evaluasi lebih lanjut untuk kedepannya agar Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur tetap mengalami pertumbuhan setiap tahunnya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPP Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023, dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-571/MK.1/2015 tanggal 18 Desember 2015 hal Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2020.

Dalam pencapaian pelaksanaan kinerja tahun 2024 seluruh jajaran KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan berpegang pada visi dan misi yang telah dicanangkan bahu membahu sekuat tenaga menyukseskan program dan kegiatan yang telah dicanangkan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Palembang Ilir Timur selaku Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak.

Besar harapan kami untuk mendapatkan umpan balik dari apa yang telah kami laksanakan selama masa dua belas bulan Tahun 2024 sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan kinerja pada periode yang akan datang.